

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha dengan visi dan misi tertentu yang secara teratur dan terus menerus melakukan suatu kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, baik atau buruknya suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya.

Menurut(Lindawati, 2010), **“Kinerja keuangan memberikan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui kondisi baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan”**.¹

Informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan prestasi kerja perusahaan dalam periode tertentu tercermin dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa pelaku usaha yang menjadikan salah satu perusahaannya menjadi perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* di kelola dengan memisahkan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan atau manajerial. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan dapat memunculkan adanya hubungan agensi.

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian

¹Amelia Lindawati, **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”**, Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol 2 No.1, Januari 2010, hal. 35

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).²

Perusahaan memberikan wewenang kepada manajer dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk merealisasikan tujuan perusahaan, yaitu seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan pengelolaan aset. Namun demikian, tidak selamanya seorang manajer perusahaan akan bertindak sesuai dengan tujuan utama perusahaan, hal ini tidak dapat dilepaskan dari motivasi kepentingan manajer secara pribadi dalam perusahaan.

Menurut(Lindawati, 2010), **“Kinerja perusahaan yang terefleksikan dalam laporan keuangan tidak dapat ditingkatkan secara maksimal karena adanya *agency conflict*, yang muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan”³**

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Farah Margareta & Andhini Asmariansi, 2009)mengatakan bahwa **“Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan sangat rentan dengan *agency conflict* (konflik kepentingan)”⁴**Konflik kepentingan dapat terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara pengelola (manajer) dengan pemilik (pemegang saham), sehingga manajer cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.*Agency conflict* dapat diminimumkan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Menurut(Lindawati, 2010), mengatakan bahwa **“Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan pemberian insentif, pengawasan, dan implementasi suatu mekanisme**

²Randhy Ichsan, “Teori Keagenan (*Agency Theory*)” di akses dari <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/>, pada tanggal 14 februari 2019 pukul 18.09

³Amelia Lindawati, **Op.Cit.** hal. 35

⁴Farah Margareta dan Andhini Asmariansi, **“Faktor-faktor *Agency Theory* yang Mempengaruhi Hutang”**, Media Riset Bisnis & Manajemen, Vol 9 No.1, April 2009, hal. 3

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut”.⁵

Perlu adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) untuk meminimumkan *agency conflict* dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu cara perusahaan agar dapat melakukan tata kelola yang baik dengan cara melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perilaku para eksekutif perusahaan demi melindungi kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002; dalam Sutedi, 2012).

Menurut (Sutedi, 2017) **“*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.**⁶

Corporate governance merupakan bagian penting dalam pengelolaan perusahaan yang memiliki prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* sehingga perusahaan yang bertata kelola dengan baik semestinya akan dapat mengurangi masalah agensi. Terdapat dua mekanisme

⁵Amelia Lindawati, **Op.Cit**, hal. 36

⁶Adrian Sutedi, **Good Corporate Governance**: Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 1

untuk menciptakan *corporate governance* yang baik yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan seperti Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Konsentrasi Kepemilikan. Mekanisme eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tertuang dalam *leverage* perusahaan.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan bagian penting dalam mensejajarkan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik dapat meminimumkan konflik agensi, dengan demikian akan mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011), dan Sari (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal, eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008) dan Sekaredi (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Setiyarini dan Purwanti (2009) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008) dan Sekaredi (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial

dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan instiusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada *monitoring* atas keputusan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008) dan Sekaredi (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Anditya (2015) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut digunakan penulis sebagai fenomena sehingga *Corporate Governance* digunakan sebagai variabel independen.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diukur dengan menggunakan indikator profitabilitas karena profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas ini diwakili oleh *Return On Equity* (ROE). Bagi setiap investor, laba adalah salah satu faktor penentu perubahan nilai efek atau sekuritas. Sebelum melakukan investasi di suatu perusahaan, para investor juga selalu yakin pada hasil perhitungan dari ROE. Semakin tinggi nilai

ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini juga yang menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Artinya seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan (dalam persentase persen) oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham akan terlihat dari ROE. ROE dipilih karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang diinvestasikan oleh investor untuk menghasilkan laba bersih. Hal ini adalah menjadi alasan yang tepat untuk digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena jenis perusahaan manufaktur menduduki proporsi terbesar di antara semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga perusahaan manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perdagangan saham di BEI. Perusahaan manufaktur merupakan suatu jenis perusahaan yang dalam kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dalam kegiatannya tersebut, selain menggunakan bahan baku sebagai bahan dasar olahannya, perusahaan manufaktur juga melibatkan tenaga kerja yang mengerjakan langsung proses pengolahan bahan baku tersebut. Mengingat jenis perusahaan sangat beragam, maka agar hasil penelitian ini dapat mewakili kondisi perusahaan pada umumnya, dipilih sampel perusahaan-perusahaan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan dalam penelitian ini selama 3 tahun.

Dari Pernyataan secara keseluruhan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?
3. Apakah proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi objek pokok adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyoroti pengaruh mekanisme *Corporate Governanc* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Pengukuran kinerja perusahaan dengan ROE dipilih karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang diinvestasikan oleh investor untuk menghasilkan laba bersih. ROE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektifitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaannya. Semakin tinggi ROE, semakin efektif dan efisien manajemen suatu perusahaan sehingga semakin tinggi pula kinerja maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *Return On Equity* (ROE)
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Return On Equity* (ROE)

3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komite audit terhadap *Return On Equity* (ROE)
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Return On Equity* (ROE)
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Return On Equity* (ROE)
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Return On Equity* (ROE)

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasandalam penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan **Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.**⁷

Sebagai contoh seseorang pemilik saham menanamkan saham dalam suatu perusahaan dan ia menyerahkan tanggungjawabnya kepada manajemen perusahaan (manajer) untuk mengelola sahamnya, dalam hal ini pemilik saham disebut *principal* dan manajer disebut sebagai agen.

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*). Manajemen dipercaya oleh pemegang saham untuk bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai kepentingan pemegang saham. Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya.

Menurut (Sutedi, 2017) **“adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.”**⁸

(Sutedi, 2017) menyatakan bahwa **“Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik agen dengan pemegang saham maupun antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman”**

⁷AmeliaLindawati, *Op.Cit.* hal. 36

⁸Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hal. 14

Manajer sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini sering kali menimbulkan masalah keagenan atau konflik agensi. Adanya perbedaaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan, dapat membuat manajemen melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan manajemen (manajer) disebut dengan *agency conflict*. Salah satu penyebab *agency conflict* adalah adanya informasi asimetri.

Informasi asimetri adalah informasi yang tidak seimbang karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara manajemen (manajer) dengan pemilik (pemegang saham). Dalam hal ini, manajer tidak memberikan informasi secara keseluruhan kepada pemegang saham mengenai ukuran keberhasilan yang akan diperoleh. Akibatnya para pemegang saham tidak memperoleh informasi secara lengkap.

Informasi yang tidak seimbang (asimetri), dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan pemilik (pemegang saham) untuk memonitor dan melakukan control terhadap tindakan-tindakan manajer. Permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard*

Yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse Selection*

Yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Manajemen yang ada dalam suatu perusahaan tidak dapat dipercaya sepenuhnya dalam mengelola perusahaan. Sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan agar para manajer dan pihak-pihak yang terkait dapat bertata kelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminumkan dengan pemberian insentif, pengawasan, dan implementasi suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut” (Lindawati, 2010).⁹

Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada *agent* untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh *principal* tidak memuaskan, *principal* dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini merupakan hal mendasar bagi praktik penerapan *corporate governance*. *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

⁹Amelia Lindawati, **Op.Cit**, hal.36

Dalam artian sempit, teori keagenan sebagai dasar penerapan *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk meminimumkan terjadinya masalah keagenan dan menurunkan biaya keagenan serta sebagai rujukan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Secara luas, *corporate governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima tingkat pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan.

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Salah satu faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu perusahaan terletak dalam kinerja keuangannya. Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang diukur dengan standar. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya.

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu” (Harahap, 2007).¹⁰ Laporan keuangan perusahaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan karena **“laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi (*screen*) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan”** (Harahap, 2007).¹¹

¹⁰Sofyan Syafri Harahap, **Analisis Kritis atas Laporan Keuangan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 105

¹¹Loc.Cit.

Dalam suatu perusahaan terdapat data keuangan yang tercermin dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilaporkan dalam bentuk neraca keuangan, laporan laba-rugi, laporan aliran kas, serta laporan-laporan keuangan lainnya.

2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat menggunakan teknik-teknik dalam analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca atau angka-angka pada laporan laba-rugi.

Dalam melakukan evaluasi data akuntansi dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang dibagi dalam lima jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas/rentabilitas, rasio leverage, dan rasio aktivitas. Penulis menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROE (*Return On Equity*) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

“Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri (*shareholders equity*)”(Raharjaputra, 2011).¹²

Rasio profitabilitas menurut (Harahap, 2007) terdiri dari:

- 1. *Profit margin* menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena**

¹²Hendra Raharjaputra, **Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Perusahaan**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 205

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. *Profit margin* mengukur rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih.

2. *Return On Assets (ROA)* menunjukkan seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. ROA mengukur rasio antarakeuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset.
3. *Return On Equity (ROE)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. ROE mengukur rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal yang merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang bersangkutan.¹³

Dari beberapa definisi diatas mengenai kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Kekuatan struktur keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah di analisis menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3 *Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Corporate Governance*

Terdapat banyak definisi tentang *corporate governance* (tata kelola perusahaan). *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas

¹³Sofyan Syafri Harahap , *Op.Cit.*, hal. 305

kinerja. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut (Sutedi, 2017) “*corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.¹⁴

Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Struktur tersebut harus diarahkan dan dikendalikan dengan baik agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

¹⁴Adrian Sutedi, **Op.Cit.**, hal. 14

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang

kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehinggamenciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikanperlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinyadengan wajar dan bernilai tinggi.

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai *corporate governance*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder*.Dalam mekanisme *corporate governance* terdapat sistem pengawasan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan perusahaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.Prinsip utama *corporate governance* yang harus dipatuhi perusahaan adalah *fairness, transparency, Idependency, accountability, dan responsibility*.

2.3.2 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*. Manfaat dalam penerapan *good corporate governance* menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* dalam (Sari, 2010)yaitu:

1. Mengurangi *agency cost* yaitu biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

6. Menjaga *going concern* perusahaan.¹⁵

Prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Menurut (Sutedi, 2017) **“menyatakan bahwa manfaat dari penerapan prinsip *good corporate governance* apabila dilakukan dengan konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan”**.¹⁶

Tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut KNKG maksud dan tujuan *good corporate governance* Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

¹⁵ Irmala Sari, **Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional:** Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 17

¹⁶ Adrian Sutedi, **Op.Cit.**, hal. 2

- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.4 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara sistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*, maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut.

“Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap *agency conflict*”(Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Pujiastuti, 2008).¹⁷ Konflik kepentingan yang terjadi antara pengelola dan pemilik dapat diminumkan

¹⁷ Triani Pujiastuti, “*Agency Cost Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Go Public di Indonesia*”, dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.2 Mei 2008, hal. 184

dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja manajer yang ada dalam perusahaan. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer dapat diminimumkan dengan pemberian insentif, pengawasan, dan implementasi mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, variabel mekanisme *corporate governance* yang ingin dikaji lebih dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) **“kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara”**.¹⁸

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham

Pasal 108 UU PT menjelaskan bahwa dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau

¹⁸Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*, Dikeluarkan Oleh: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Jakarta; 2006, hal.13

Perusahaan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kinerja perusahaan.

Pasal 116 UU PT lebih lanjut menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib untuk:

- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan yang telah dilakukan kepada RUPS.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

2.4.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen

lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer. Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.

Fama dan Jensen (1983) dalam (Budiarti & Sulistyowati, 2014) menyatakan bahwa **“Komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer”**.¹⁹

Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi *mismanagement* yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya *mismanagement* menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

2.4.3 Proporsi Komite Audit

¹⁹Ella Budiarti dan Chorry Sulistyowati, “Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan Perusahaan”, dalam Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 7. No. 3, Desember 2014, hal.164

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris.

Komite audit juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Proporsi komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada di suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.4.4 Ukuran Dewan Direksi

Menurut (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006) "**Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan**".²⁰ Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

²⁰Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Op.Cit, hal. 17

- a. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan;serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatanperusahaan.
- c. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistempengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasiantara perusahaan dengan pemangku kepentingan denganmemberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas danterfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketentuan jumlah minimal dewan direksi yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah 2 orang.Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik.

2.4.5 Kepemilikan Manajerial

Menurut(Christiawan & Tarigan, 2007)“**Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai**

pemegang saham".²¹ Kepemilikan saham manajerial dapat menyatukan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui kepemilikan saham manajerial, manajer diharapkan lebih bertindak untuk kepentingan pemegang saham setelah memiliki porsi saham tertentu di dalam perusahaan karena manajer memiliki resiko keuangan yang sama dengan *stakeholders* sehingga menuntut manajer memiliki kinerja lebih baik.

Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Contoh strategi yang diambil adalah integrasi terhadap perusahaan lain dengan mempertimbangkan peningkatan penjualan jangka panjang.

Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadirendah. Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer terhadap jumlah saham beredar.

2.4.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

²¹Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan, "Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, No. 1, Mei 2007, hal. 2

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Mahadewi & Krisnadewi, 2017) menyatakan bahwa **“Kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meminimisasi konflik keagenan”**.²² Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan juga semakin kuat sehingga dapat meminimumkan *agency cost* dan meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat kepemilikan yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar suara dan dorongan institusi untuk melakukan pengawasan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan yang intens.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Indikator mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite

²² Istri Sri Mahadewi dan Komang Ayu Krisnadewi, **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Insitusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Manajemen Laba”**, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18.1. Januari (2017) : 443-470, hal. 451

audit dan kepemilikan institusional dengan Tobin's Q yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pasar dan *Cash Flow Return On Asset (CFROA)* sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.

Bukhori (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan *CFROA*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Setiyarini dan Purwanti (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan, dan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite

audit. Manajemen laba diukur dengan menggunakan akrual diskresioner dari model Jones yang dimodifikasi dan kinerja perusahaan dengan Tobin's Q. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2006-2008 dengan jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh.

Mulyasari, Djaelani dan Salim (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Kinerja perusahaan diukur dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Muntiah (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris dan komite audit. Kinerja perusahaan diukur dengan ROE (*Return on Equity*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, proporsi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

No	Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
----	----------	-------------------	----------------

1	Sekaredi (2011)	<p>Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> (dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional) Variabel dependen: Kinerja keuangan perusahaan (Tobin's Q untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pasar dan <i>Cash Flow Return On Asset</i> (CFROA) sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan).</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan..</p>
2	Bukhori (2012)	<p>Variabel dependen: kinerja perusahaan diukur dengan <i>CFROA</i>. Variabel independen: ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>
3	Setiyarini dan Purwanti (2009)	<p>Variabel dependen : kinerja perusahaan yang diukur dengan kinerja <i>Tobin's Q</i>. Variabel independen : Mekanisme <i>corporate</i></p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan</p>

		<i>governance</i> diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.	terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh.
4	Mulyasari, Djaelani dan Salim (2017)	Variabel dependen: kinerja keuangan yang diukur dengan <i>Return on Assets</i> (ROA). Variabel independen : Mekanisme <i>corporate governance</i> diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh.
5	Muntiah (2014)	Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> (ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) Variabel dependen: Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROE (<i>Return on Assets</i>).	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh.

2.6 Kerangka Konsep

Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Salah satu kepentingan pokok dari pemegang saham adalah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya *conflict on interest* yang dilakukan oleh para manajer perusahaan.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik.

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang dikelola. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer terhadap jumlah saham beredar.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu

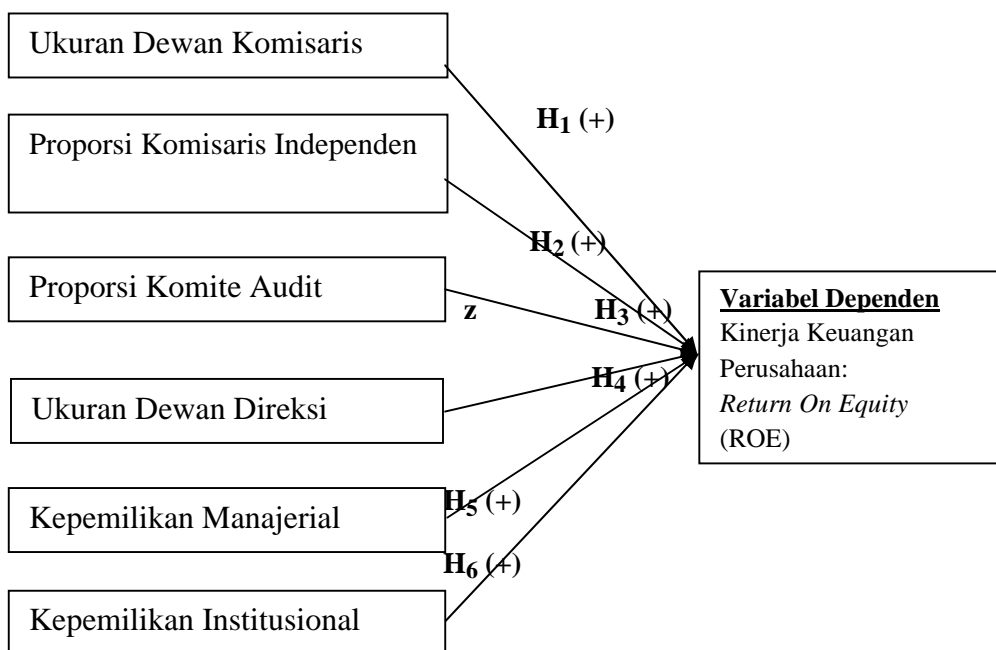
perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh institusi pemegang saham, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kerangka konsep teoritis penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Kerangka Konsep

Variabel Independen

Mekanisme *Corporate Governance*



Gambar 2.1

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pembahasan terperinci mengenai rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (Ridho dan Aditya, 2013). Dalam hal ini, dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan menilai tata kelola perusahaan.

Ukuran dewan komisaris memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho dan Aditya (2013) mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Semakin baik kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

2.7.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Komisaris Independen merupakan sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Dalam hal ini, komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

Semakin besar komisaris independen dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yaitu Setiyarini dan Purwanti (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif

antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

2.7.3 Pengaruh Proporsi Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite Audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Anditya (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit secara statistik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara *agent* dengan *principal* adalah ketika adanya kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Xie *et al.* (2003) dalam Ridho dan Aditya (2013) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen yang tidak baik, sehingga dengan adanya pencegahan tersebut, kinerja perusahaan menjadi meningkat. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Proporsi Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

2.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam tata kelola yang dilakukan perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Semakin besar ukuran dan komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan jika komposisi dewan direksi lebih banyak didominasi oleh dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan dan kinerja serta nilai perusahaan akan rendah jika ukuran dan komposisi dewan direksi berasal dari dalam perusahaan.

Ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan yang meningkat. Hasil penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ridho dan Aditya (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja keuangan perusahaan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

2.7.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Lindawati (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

2.7.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking. Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi dapat mengontrol perilaku manajer agar manajer tidak berusaha mencapai kepentingannya sendiri, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan maksimal. Adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap pihak manajemen sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan manajer untuk berbuat kecurangan dalam mengelola perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka konflik antara pemegang saham dengan manajer akan semakin berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur dan secara berturut-turut terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai 2017 atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut (Kuncoro, 2013), **“Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”**.²³

Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2005), **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”**.²⁴

²³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, 2013, hal.118

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, 2005, hal. 90

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Total populasi yaitu 141 perusahaan yang terdiri dari 3 sektor industri yaitu industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri.

3.2.2 Sampel

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”(Sugiyono, 2005)²⁵

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive judgement sampling* yaitu penentuan secara tidak acak (non-probabilitas) yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel antara lain:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten pada tahun 2015-2017 dan tidak mengalami *delisting*.

²⁵Ibid, hal.91

3. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah, karena jika menggunakan mata uang asing maka akan terjadi perbedaan penilaian kinerja keuangan yang disebabkan oleh perbedaan kurs saat ini dengan kurs pada tahun yang diteliti yaitu tahun 2015-2017.
4. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam *annual report*, yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional pada tahun 2015-2017.

Tabel 3.1
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017	141
2	Perusahaan yang mengalami delisting selama tahun 2015-2017	(3)
3	Perusahaan yang menggunakan mata uang Asing	(66)
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>) dalam <i>annual report</i> pada tahun 2015-2017	(34)
5	Data perusahaan yang dapat dianalisis	38
6	Obsevasi yang diperoleh selama periode 2005 sampai dengan 2017	114

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari kriteria yang ditetapkan diperoleh 38 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2

**Daftar Perusahaan Manufaktur yang menjadi Sampel Penelitian
Periode 2015-2017**

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3	ALDO	PT. Alkindo Naratama Tbk
4	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk
5	ASII	PT. Astra International Tbk
6	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk
7	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8	DPNS	PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk
9	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
10	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna
11	INAI	PT. Indal Alumunium Industry Tbk
12	INCI	PT. Intanwijaya Internasional Tbk
13	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
14	INAF	PT. Indofarma Tbk
15	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
16	INDS	PT. Indospring Tbk
17	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk
18	IGAR	PT. Kageo Igar Jaya Tbk
19	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
20	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
21	KBLI	PT. KMI Wire and Cable Tbk
22	KIAS	PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
23	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk
24	LMSH	PT. Lionmesh Prima Tbk
25	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
26	MAIN	PT. Malindo Feedmill Tbk
27	PRAS	PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk
28	RMBA	PT. Bantoel International Investama Tbk
29	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk
30	SCCO	PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
31	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk
32	SMGR	PT. Semen Indonesia Tbk
33	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk
34	SRSN	PT. Indo Acidatama Tbk

35	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
36	TOTO	PT. Surya TOTO Indonesia Tbk
37	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
38	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk

Sumber: Data olahan tahun 2019

3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut(Sugiyono, 2005)“variabel ini sering di sebut sebagai *variabel stimulus, predickor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.²⁶

Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini mencoba untuk meneliti hubungan langsung antara mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROE. Menurut(Deanta, 2016)“Rasio ini mengukur kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham.”²⁷ ROE dalam suatu perusahaan dapat dihitung dari:

$$\text{ROE} = \frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

3.3.2 Variabel Independen

²⁶Ibid, hal.39

²⁷ Deanta, Memahami Pos-pos dan Angka-angka dalam Laporan Keuangan untuk Orang Awam, *Gava Media*, 2016, hal.51

Menurut (Sugiyono, 2005)“**variabel independen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karna adanya variabel bebas**”.²⁸

Variabel Independendalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

2. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris.

3. Proporsi Komite Audit

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Proporsi komite audit diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik terhadap seluruh anggota komite audit.

4. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

²⁸ Sugiyono, **Op.Cit.**, hal.40

Ukuran dewan direksi = Jumlah dewan direksi perusahaan

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang diterbitkan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\% \text{lembar saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham oleh institusi di dalam perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\% \text{lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut(Sugiyono, 2005), **“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”**.²⁹

Jadi, Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan mempunyai variabel independen lebih dari satu. Alat analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen dan pengaruh mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen.

Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$\text{ROE} = o + 1 \text{ DEKOM} + 2 \text{ KOMINDEP} + 3 \text{ KOMDIT} + 4 \text{ DEDIR} \\ + 5 \text{ KEPMAN} + 6 \text{ KEPINS} +$$

Dimana:

ROE = *Return on Equity*

DEKOM = Proporsi dewan komisaris

KOMINDEP = Proporsi komisaris independen

²⁹Ibid, hal.169

KOMDIT = Proporsi Komite Audit

DEDIR = Proporsi dewan direksi

KEPMAN = Kepemilikan Manajerial

KEPINS = Kepemilikan Institusional

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ϵ = *error*

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi berganda. Hal ini disebabkan karena penelitian ini terdapat lebih dari 1 variabel independen dengan 1 variabel dependen. Untuk dapat melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Syarat asumsi klasik tersebut agar menjadi model persamaan estimasi yang baik, yaitu:

1. Error menyebar normal atau data berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan memiliki suatu ragam (variance) tertentu yang diketahui melalui uji normalitas.
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam error sehingga bersifat homoskedastis.
3. Tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas yang diketahui melalui uji multikolinier.
4. Error tidak mengalami autokorelasi (error tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri).

1. Uji Normalitas

Menurut(Ghozali, 2016)“**Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah salam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal**”.³⁰Uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusinormal.Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untukjumlah sampel kecil.Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusinormal.

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik*normal probability plot* dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbudiagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probabilityplot* adalah (Ghozali, 2016):

1. **Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.**
2. **Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.**³¹

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z(1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2016):

1. **Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.**
2. **Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.**³²

2. Uji Heteroskedastisitas

³⁰ Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal.154

³¹ **Ibid**, hal.156

³² **Ibid**, hal.158

Menurut (Ghozali, 2016)“**Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain**”.³³Heterokedastisitas berarti penyebarantitik data populasi pada bidang regresi membentuk pola tertentu yang teratur.Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalammodel regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan laintetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebutheteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.Ujiheterokedastisitas dapat menggunakan Uji *Glejser*.Uji ini menggunakan nilaiabsolute dari residual dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadiheterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2016)“**mengatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen)**”.³⁴Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalammodel regresi.“**Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen**”(Ghozali, 2016).³⁵“**Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *varianceinflation factor* (VIF). Batas untuk *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10**”(Ghozali, 2016).³⁶Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

³³**Ibid**, hal.134

³⁴**Ibid**, hal.103

³⁵**Loc.Cit.**

³⁶**Ibid**, hal.104

4. Uji Autokorelasi

“Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)”(Ghozali, 2016).³⁷ Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin – Watson Statistic. Untuk mengetahui terjadi atau tidak autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin Watson pada tabel. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis – hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*). Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t).

³⁷ *ibid*, hal. 107

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut (Ghozali, 2016) **“uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen”**.³⁸ Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- I. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- II. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen (*goodness of fit*), yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R^2). (Ghozali, 2016) **“mengatakan Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”**.³⁹ Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

³⁸ Loc.Cit

³⁹ Ibid, hal.95

mendekatisatu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

(Ghozali, 2016) **“menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model”**.⁴⁰ Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai (R^2) akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2016) **“mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai *adjusted* (R^2) dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif”**.⁴¹ Apabila terdapat nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

⁴⁰Loc.Cit.

⁴¹Ibid